

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis: Kepailitan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Amirudin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Gunarto Suhardi, *Usaha Perbankan Dalam Perspektif Hukum*, Yogyakarta: Kanisius, 2003.
- Gunawan Widjaja, *Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Iswi Hariyani, S.H., M.H., *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010.
- Johanes Ibrahim, *Cross Default & Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Macet*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2004.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Kartini Muljadi, "Pengertian dan Prinsip-Prinsip Umum Hukum Kepailitan; dalam Rudy Lontoh (ed), 2001, *Phenylation Utang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung: Alumni, 2001.
- Man. S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung: PT. Alumni, 2006.
- Maria S.W.Sumardjono, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, Jakarta: PT Gramedia, 1996.
- Marium Darius Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Bandung: Penerbit Alumni, 1963.
- Martin Sabine, *Corporate Finance: Flotation, Equity Issues and Acquisitions*, Second Edition, Butterworths, London: Budlin and Edinburgh, 1993.
- Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018.
- Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.

Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005.

Prof. Dr. Kamaludin, SE., MM, *Restrukturisasi, Merger & Akuisisi*, Bengkulu: CV. Mandar Maju, 2015.

Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001.

Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, Malang: UMM Press, 2007.

Ridwan Khairandy, *Pengantar Hukum Dagang*, Yogyakarta: FH UII Press, 2006.

Rudy A. Lontoh, *Penyelesaian Utang-Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung: Alumni, 2001.

Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, Bandung: Mandar Maju, 2012.

Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran Dan Penerapan*, Jakarta: Rineke Cipta, 1999.

Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2010.

Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, Dan Teori Hukum Kepailitan*, Jakarta: Kencana, 2016.

Syamsudin Manan Sinaga, *Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Restrukturisasi Utang pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Yogyakarta: Gama Media Printing, 2014.

Umar Haris Sanjaya, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Hukum Kepailitan*, Yogyakarta: NFP Publishing, 2014.

Victor M Situmorang, Hendri Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.

B. HASIL PENELITIAN/TUGAS AKHIR

B.E Hermawan, 2017, *Studi Tentang Pembatalan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Pembatalan Perjanjian Perdamaian Yang Diajukan Oleh Bank Pemerintah Terhadap Perusahaan Swasta Dikarenakan Perbedaan Penafsiran Dan Isi Presepsi Perjanjian Perdamaian Yang Telah Disepakati Dan Telah Dihomologasikan Oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat*. Tesis, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

Sigit P. Nugroho, 2008, *Restrukturisasi Utang Dengan Pola Konversi Utang Menjadi Saham: Study Kasus PT. Sekar Laut Tbk Vs PT. Bank BNI Tbk*, Tesis, Jakarta: Program Studi Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Vychung Chongson, 2019, *Kedudukan Hukum kreditur konkuren Dalam Perjanjian Perdamaian Yang Telah Disahkan Oleh Pengadilan Niaga (Analisis Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 01/Pdt.Sus/Pembatalan Perdamaian/2016/Pn.Niaga.Jkt.Pst. Jo No.11/Pdt.Sus-PKPU/2014/Pn.Niaga.Jkt.Pst)*, Tesis, Jakarta: Universitas Gadjah Mada.

C. MAKALAH/PIDATO

Ellyana S. Proses, Cara Mengajukan dan Penyelesaian Rencana Perdamaian pada Penundaan Kewajiban Pembayaran, Makalah disampaikan dalam Lokakarya Undang-Undang Kepailitan, Jakarta, 3 – 14 Agustus 1998.

Emmy Yuhassarie, Tri Harnowo dalam Rangkaian Lokakarya Terbatas “Masalah-Masalah Kepailitan Dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya, Pemikiran Kembali Hukum Kepailitan Indonesia”, Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005.

Kartini Muljadi, Restrukturisasi Utang, Kepailitan Dalam Hubungannya Dengan Perseroan Terbatas, Makalah Disampaikan Pada Seminar PKPU Sebagai Sarana Menangkis Kepailitan Dan Restrukturisasi Perusahaan, Kantor Advokat Yan Apul & Rekan, Jakarta, 26 September, 1998.

Sri Redjeki Hartono, *Aspek Hukum Restrukturisasi Perusahaan*, Makalah disampaikan dalam *Seminar Nasional Restrukturisasi Perusahaan*, yang diselenggarakan Fakultas Hukum UII-UNDIP, Semarang 28 Nopember 1998.

Wimba Respati, “Kebijakan Restrukturisasi Utang Melalui *Debt To Equity Swap*”, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan EKUITAS*, Vol.14 No.1, 2010.

D. RUJUKAN ELEKTRONIK

Ali Sumali Nugroho, 2011, Jaminan Perlindungan Perjanjian Perdamaian dalam UU Kepailitan, <<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4d2d9a5699935/jaminan-perlindungan-perjanjian-perdamaian-dalam-uu-kepailitan/>>, [diakses pada tanggal 19 Mei 2020].

Berita Satu, 2011, “CIMB Kasasi, APOL Terancam Pailit, <[CIMB Kasasi, APOL Terancam Pailit \(beritasatu.com\)](http://beritasatu.com)>, [diakses pada tanggal 12 Juni 2021].

Khresna Guntarto, 2011, “Nasib Keberatan CIMB Niaga di PKPU APOL

ditentukan Kamis ini”, <[Nasib keberatan CIMB Niaga di PKPU APOL
ditentukan Kamis ini \(gresnews.com\)](#)>, [diakses pada tanggal 12 Juni
2021]

E. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang

Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/10/PBI/2003 tentang Prinsip Kehati-hatian
Dalam kegiatan Penyertaan Modal

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan
Manajemen Risiko bagi Bank Umum

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.03/2017 tentang Prinsip
Kehati-Hatian Dalam Kegiatan Penyertaan Modal

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian
Kualitas Aset Bank Umum